

**PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP REVITALISASI PASAR  
TRADISIONAL DALAM MENINGKATKAN PENCAPAIAN RETRIBUSI  
(Case Study di Bidang Pemasaran pada Dinas PERINDAGKOP dan UMKM  
Kabupaten Bekasi)**

**Sri Purwati**

Dosen STIE Bisnis Indonesia, Jakarta

**Abstract :** *The aim of this study was to determine the effect of variable Direct Supervision  $t > t$  table ( $-1.625 > 2.021$ ), then  $H_0$  is accepted means there is no significant effect of the variable direct supervision (X1) to the revitalization of traditional markets (Y), to the variable Indirect supervision  $t > t$  table  $> -2.021$ )  $H_0$  refused meaning there is a significant effect of the variable Indirect supervision (X2) the Revitalization of Traditional Markets (Y). Correlation (R) of 0.256, indicating that there is a correlation or a weak connection between the Control Direct (X1) and Supervision Indirect (X2) jointly against Revitalization of Traditional Markets (Y) and the coefficient of determination ( $R^2$ ) is 0,65 or 6.5%, which means independent variables consisting of Direct Supervision (X1) and Supervision Indirect (X2) may contribute to the effect of 6.5% while the rest is explained by other variables. For simultaneous test F-count - F- table ( $14.278 > 3.23$ ) means that  $H_a$   $H_0$  accepted or rejected the variable direct supervision (X1) and variable indirect supervision (X2) together (simultaneously) has significant influence on traditional market revitalization variable (Y).*

**Keywords:** *Direct Supervision, Monitoring of Indirect and Revitalization of Traditional Markets*

**Abstrak :** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel Pengawasan Langsung  $t$  hitung  $> t$  tabel ( $-1,625 > 2,021$ ) maka  $H_0$  diterima berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Pengawasan langsung (X1) terhadap Revitalisasi pasar tradisional (Y), untuk variabel Pengawasan Tidak Langsung  $t$  hitung  $> t$  tabel  $> -2,021$ )  $H_0$  ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel Pengawasan Tidak Langsung (X2) dengan Revitalisasi Pasar Tradisional (Y). Korelasi (R) sebesar 0,256 yang berarti menunjukkan bahwa adanya korelasi atau hubungan yang lemah antara Pengawasan Langsung (X1) dan Pengawasan Tidak Langsung (X2) secara bersama-sama terhadap Revitalisasi Pasar Tradisional (Y) dan *coefficient of determination* ( $R^2$ ) adalah 0,65 atau 6,5% yang berarti variabel bebas yang terdiri dari Pengawasan Langsung (X1) dan Pengawasan Tidak Langsung (X2) dapat memberikan kontribusi pengaruh sebesar 6,5% sedangkan sisanya diterangkan oleh variabel lain. Untuk uji simultan F-hitung - F- tabel ( $14,278 > 3,23$ ) artinya  $H_a$  diterima atau  $H_0$  ditolak yaitu variabel Pengawasan langsung (X1) dan variabel pengawasan tidak langsung (X2) secara bersama-sama ( simultan ) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Revitalisasi pasar tradisional (Y).

**Kata kunci :** Pengawasan Langsung, Pengawasan tidak Langsung dan Revitalisasi Pasar Tradisional

## 1. PENDAHULUAN

Seiring dengan tuntutan dan harapan masyarakat agar institusi pemerintahan mampu menjadi "Good Governance" dan dalam rangka memenuhi tuntutan para Publik selaku pengguna Jasa, maka Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Bekasi selalu berupaya meningkatkan kinerja organisasi dengan melaksanakan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Bekasi. Tentang peningkatan pelayanan publik menjadi prioritas utama dalam menjalankan kegiatannya.

Hal tersebut di atas, tidak akan terwujud apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang sangat vital bagi setiap organisasi baik instansi pemerintah maupun lembaga usaha/perusahaan karena merupakan unsur pengelola, perencana, pengatur, pelaksana, sekaligus penentu dalam organisasi. Para pimpinan/pejabat struktural merupakan unsur yang terlibat dalam pengelolaan, perencanaan, pengaturan kegiatan dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi instansi tersebut. Sedangkan para pegawai adalah Sumber Daya yang lebih banyak terlibat sebagai pelaksana. Para individu-individu dalam organisasi harus bertindak dalam rangka kerja sama dengan pihak yang mengkoordinasi, mengarahkan dan melaksanakan aktivitas-aktivitas organisasi. Pada kenyataannya, para pemimpin dapat mempengaruhi kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja, kinerja dan semangat kerja pegawai dalam suatu organisasi. Para pemimpin juga memainkan peranan kritis dalam membantu kelompok, organisasi atau masyarakat untuk mencapai tujuan mereka.

Pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung sangat diperlukan sekali dalam proses revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Bekasi supaya di dapatkan hasil yang optimal. Ketertiban pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan harus tetap dijaga agar benar-benar ada upaya pemanfaatan secara efektif dan efisien dari sumberdaya yang ada, sehingga dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Terkait revitalisasi pasar tradisional, maka kita harus memahami tentang Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Melihat fungsi dan peran pasar tradisional yang strategis dalam peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja, maka dalam pembangunan sektor perdagangan merupakan salah satu program prioritas yang telah dikembangkan.

Program tersebut secara simultan dan sinergis akan terus dikembangkan untuk memperkuat pasar dalam negeri melalui pemantapan suplai serta menjaga kelancaran dan efisiensi distribusi barang kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah tanah air.

Dibalik peran pasar tradisional yang strategis tersebut diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan daya saing pasar tradisional yang identik dengan sebuah lokasi perdagangan yang kumuh, semrawut, kotor dan merupakan sumber kemacetan lalu lintas, menjadi citra yang positif. Langkah tersebut bisa dilaksanakan dengan baik apabila di barengi dengan adanya pengawasan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, supaya segala sesuatunya bisa berdaya guna dan berhasil guna dengan baik dan optimal. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat meningkatkan retribusi di bidang perpasaran yang bermuara pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sesuai dengan hasil pengamatan peneliti terhadap proses revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Bekasi maka sekiranya kami ingin meneliti dan membahasnya dalam bentuk Tesis yang berjudul "**Pengaruh Pengawasan Terhadap Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam meningkatkan Pencapaian Retribusi (Case Study di Bidang Perpasaran pada Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Bekasi)**"

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1. Fungsi Pengawasan di dalam Administrasi dan Manajemen

Dalam istilah administrasi mempunyai ciri adanya kelompok manusia yang terdiri dua orang atau lebih, terorganisasikan secara formal, ada proses kerjasama dari kelompok manusia tersebut, ada kegiatan memimpin dan mengendalikan, serta mempunyai tujuan yang hendak dicapai dan telah direncanakan. Ciri tersebut sejalan dengan pengertian administrasi yang dijelaskan oleh Siagian, (1998:3) bahwa administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Seluruh proses administrasi didalam setiap organisasi, pada dasarnya bertujuan untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan organisasi bukan hanya sekedar dicapai secara efektif, namun juga memenuhi persyaratan ekonomis (efisien). Karena itu setiap tindakan administrasi harus sudah melalui perhitungan yang rasional. Didalam praktek, banyak sekali hal-hal yang harus diperhitungkan agar jalannya administrasi dapat terselenggara secara efektif dan efisien.

Dengan demikian maka segenap sumberdaya manusia yang menjadi pelaksana administrasi harus diarahkan, dibimbing, diberi dorongan dan rangsangan, agar supaya dapat dikerahkan sekaligus dikendalikan kearah upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang dikehendaki melalui proses yang disebut manajemen. Pengarahan dan pengendalian sumberdaya manusia termasuk sumber-sumber lain yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien bagi proses pelaksanaan administrasi dalam mencapai tujuan dan sasaran, itulah yang disebut manajemen. Sejalan dengan hal diatas, maka dalam hubungan ini dapat diketahui bahwa baik organisasi maupun manajemen secara implisit masuk kedalam tugas administrasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Albert Lepawsky (2000:38) yang mengemukakan bahwa : *Administration is used in the broad sense include organization and management*. Adapun pengertian manajemen yang dikemukakan oleh Winardi (1998:4) sebagai berikut : “Manajemen merupakan sebuah proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia serta sumber-sumber lain.”

Selain sebagai ilmu manajemen juga sebagai seni pengaturan proses usaha. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam peranannya sebagai ilmu, manajemen merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang sistematis dan dapat diterima sehubungan dengan pengertian tentang kebenaran secara universal mengenai manajemen. Kemudian dalam peranannya sebagai seni pengaturan proses usaha bahwa manajemen meliputi kemampuan untuk melihat totalitas banyak bagian yang terpisah yang berbeda dan untuk menciptakan bahwa seni manajemen mencakup juga kemampuan untuk komunikasi visi tersebut dengan kemampuan efektif atau kepandaian. Dengan demikian proses manajemen disamping sebagai suatu ilmu pengetahuan, sekaligus juga sebagai suatu seni yang kreatif karena berperan sebagai organisator dalam mengatur pemanfaatan dari bakat manusia.

Bertitik tolak dari beberapa pengertian tentang manajemen sebagaimana telah diuraikan diatas sesuai pendapat para pakar, maka dapat diperoleh pemahaman bahwa pada dasarnya didalam proses manajemen tersebut terdapat fungsi-fungsi organik yang sangat fundamental. Untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai fungsi manajemen, kita bisa melihat pada beberapa pendapat para pakar. Menurut George R. Terry sebagaimana yang dikutip oleh Hasibuan (2005 : 26) : Bahwa fungsi-fungsi manajemen dikenal dengan akronim **POAC**, yakni meliputi: Planning (Perencanaan) ; Organizing (Pengorganisasian) ; Actuating (pemberian motivasi) ; dan Controlling (Pengawasan). Sementara Siagian (1998:107), juga mengemukakan fungsi-fungsi organik yang terdapat didalam manajemen antara lain meliputi : Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Pemberian motivasi (Motivating), Pengawasan (Controlling), dan Penilaian (Evaluating).

Secara ringkas didalam uraian diatas telah diutarakan bahwa penekanan pengertian

manajemen merupakan waktu usaha untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien melalui kegiatan orang lain. Kenyataan ini menggambarkan bahwa manajemen itu tidak lain merupakan proses pemanfaatan potensi sumberdaya manusia dan sumber-sumber daya yang lain, yang dengan segala kemampuannya diarahkan kepada pencapaian tujuan. Dalam hal ini berarti didalam kegiatan itu terdapat dua unsur peranan manusia, yaitu kelompok manusia yang berperan sebagai unsur pimpinan dan kelompok manusia yang berperan sebagai unsur bawahan.

Dalam hal ini dapat dikatakan sehubungan dengan kegiatan pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain, unsur pimpinan merupakan komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya proses manajemen, karena pimpinan selain melaksanakan fungsi-fungsi manajemen juga memiliki tanggung jawab untuk sedemikian berusaha mempengaruhi bawahan, memberikan motivasi dan mengarahkan agar supaya dapat melaksanakan tugas sesuai dengan perintah pimpinan demi tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

Apabila pimpinan selaku atasan memberikan kewenangan tertentu terhadap para bawahannya, berarti pimpinan telah memberikan kepercayaan dan menganggap bawahan tersebut cakap untuk melakukan tugas tersebut dan mempunyai peran yang cukup penting. Karena itu, pimpinan yang paling cakap adalah yang dapat mendelegasikan sebanyak mungkin wewenang dan menghindari pengawasan yang terlalu ketat.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan pimpinan harus menyadari bahwa setiap anggota organisasi sebagai unsur sumber daya manusia mempunyai peranan penting. Hal ini seperti dijelaskan Winardi (1998:314) sebagai berikut :Arti penting sumberdaya manusia bagi suatu organisasi terletak kepada kemampuannya untuk bereaksi secara sukarela dan secara positif terhadap sasaran pelaksanaan pekerjaan serta kesempatan-kesempatan dan dalam rangka usaha melaksanakannya mereka mencapai kepuasan dari hasil pekerjaan dan karena berada dalam lingkungan pekerjaan yang bersangkutan. Hal tersebut mengharuskan dimilikinya syarat-syarat bahwa orang tepat dengan pengetahuan serta keterampilan yang tepat berada pada tempat yang tepat untuk melaksanakan pekerjaan yang harus dikerjakan. (Winardi, 1998:314)

## **2.2. Pengertian dan Tujuan Pengawasan**

Setelah menelusuri tentang eksistensi fungsi pengawasan didalam proses administrasi dan manajemen, selanjutnya mengenai pengertian pengawasan itu sendiri menurut Siagian (1998:135) pengawasan ialah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

Menurut Mc.Farland seperti yang dikutip oleh Handyaningrat (2004:143), mengemukakan pengertian pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian bagaimanapun baiknya suatu rencana, bagaimanapun baiknya penggunaan sumber-sumber yang dimiliki, tetapi jika tidak diawasi dengan baik maka tujuan yang telah ditetapkan mungkin akan mengalami kegagalan, karena pelaksanaan kegiatan tidak terkendali. Pengertian pengawasan yang dimaksud tidak berbeda dengan yang dikemukakan oleh Sujamto (1996:27) yang mengartikan pengawasan sebagai berikut :Segala usaha untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan atau hasil yang dikehendaki serta sesuai pula dengan segala ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada dasarnya sejalan dengan uraian yang dikemukakan oleh Devung (1998:116) sebagai berikut :Peran pengawasan adalah ibarat mata dan telinga pimpinan (manajer), sebagai mata dan telinga tentu saja ia tidak dapat berbuat apa-apa selain melihat dan mendengar. Tetapi fakta atau kenyataan yang sebenarnya ia lihat dan dengar itu tidak untuk didiamkan

saja, melainkan untuk diteruskan dan dilaporkan kepada manajer (pimpinan) sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan atau tindakan korektif. (Devung, 1998:116)

Dari pengertian pengawasan diatas meskipun masing-masing berada didalam penekanannya, namun menggambarkan 2 (dua) bagian yang sama yaitu pertama menggambarkan wujud kegiatan dalam pengawasannya yang inti pokoknya adalah kegiatan atau usaha mengendalikan, dan bagian kedua menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pengawasan. Menurut Wahyudi (2001:82), Pengawasan adalah menderteminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana, pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.

Adapun mengenai pengawasan sebagaimana dijelaskan didalam pasal satu ayat satu dan dua Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang pedoman pengawasan, sebagaimana dikutip Wursanto (1995:96) yakni sebagaimana berikut: Pengawasan adalah bertujuan untuk mendukung kelancaran dan ketetapan pelaksanaan kegiatan pemerintah maupun tugas dibidang pembangunan. Dalam merencanakan dan melaksanakan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar pelaksanaan tugas umum dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintah agar tercapai daya guna dan hasil guna yang sebaik-baiknya.
2. Agar pelaksanaan pengawasan dilakukan sesuai dengan rencana dan program pemerintah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan.
3. Agar hasil-hasil pembangunan dapat dinilai seberapa jauh tercapai untuk memberi umpan balik berupa pendapat, kesimpulan dan saran atas kebijaksanaan perencanaan, pembinaan dan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
4. Mencegah adanya pemborosan dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang dan perlengkapan milik negara, sehingga dapat terbina pegawai yang tertib, bersih, berwibawa, berhasilguna dan berdaya guna.

Ruang lingkup pengawasan mencakup sasaran-sasaran kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan umum pemerintahan
2. Kegiatan pelaksanaan rencana pembangunan
3. Kegiatan BUMN dan BUMD
4. Kegiatan aparatur pemerintahan dalam bidang kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.

Agar pelaksanaan pengawasan dapat menghasilkan suatu yang sesuai dengan yang diterapkan (efektif) para pimpinan yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pengawas perlu dimiliki kemampuan dalam melaksanakan fungsi pengawasan, antara lain harus menguasai metode dan teknik pengawasan. Metode dan teknik pengawasan menurut Handyaningrat (2004:147) adalah sebagai berikut : 1). Pengawasan langsung, 2). Pengawasan tidak langsung, 3). Pengawasan formal, 4). Pengawasan informal, 5). Pengawasan administratif dan 6). Pengawasan teknis.

Untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai metode dan teknik pengawasan tersebut, maka dapat dilihat dari uraian seperti disajikan dibawah ini :

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung terjadi apabila aparat pengawasan pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif maupun sistem investigatif. Metode ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan.



2. Pengawasan Tidak Langsung  
Pengawasan tidak langsung dilaksanakan oleh aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melalui pemeriksaan pekerjaan atau melalui laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata, dengan angka-angka atau statistik yang berisi gambaran kemajuan yang dicapai.
3. Pengawasan Formal  
Pengawasan formal adalah pengawasan secara formal dilakukan oleh unit/aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu. Dalam melakukan pengawasan itu biasanya telah ditentukan prosedur, hubungan dan tata kerjanya. misalnya: periode waktu pemeriksaan, periode waktu pertanggung jawaban dan periode waktu laporan. Aparat pengawasan dalam hal ini harus membuat pelaporan untuk melaporkan segala sesuatu secara periodik perkembangan dari hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan terhadap pimpinan. Pelaporan yang dimaksudkan harus disertai saran-saran perbaikan atau penyempurnaan.
4. Pengawasan Informal  
Pengawasan Informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal biasanya dilakukan oleh pejabat atau pimpinan melalui kunjungan yang tidak resmi ( pribadi ). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekakuan dalam hubungan antar atasan dan bawahan. Dengan cara demikian pimpinan menghendaki keterbukaan dalam memperoleh informasi dan sekaligus usul dan saran perbaikan atau penyempurnaan dari bawahannya.
5. Pengawasan Administratif  
Pengawasan Administratif ialah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian dan material.
6. Pengawasan Teknis  
Pengawasan Teknis adalah pengawasan terhadap hal-hal bersifat fisik, misalnya pemeriksaan terhadap pembangunan gedung, pemeriksaan terhadap pembuatan kapal, pemeriksaan terhadap penanaman padi disawah, pemeriksaan kesehatan rakyat didesa dan sebagainya.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pengawasan mengandung maksud mencegah sekaligus memperbaiki kesalahan, penyimpangan, dan hal-hal yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang ditentukan. Jadi maksud pengawasan bukanlah mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap pelaksanaan pekerjaannya. Sedangkan tugas pengawasan pada dasarnya adalah dimaksudkan agar hasil pekerjaan yang diperoleh secara efektif dan efisien, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, prosedur maupun kebijakan.

### **2.3. Revitalisasi Pasar Tradisional**

#### **2.3.1. Program Revitalisasi Pasar Tradisional**

Melihat fungsi dan peran pasar tradisional yang strategis dalam peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja, maka dalam pembangunan sektor perdagangan merupakan salah satu program prioritas yang telah dikembangkan mulai tahun 2004-2009 merupakan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. Program tersebut secara simultan dan sinergis akan terus dikembangkan untuk memperkuat pasar dalam negeri melalui pemantapan suplai serta menjaga kelancaran dan efisiensi distribusi barang kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah tanah air. Dibalik peran pasar tradisional yang strategis tersebut diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan daya saing pasar tradisional yang identik dengan sebuah lokasi perdagangan yang kumuh, semrawut, kotor dan merupakan sumber kemacetan lalu lintas. Citra Pasar Tradisional yang kurang baik tersebut sudah semestinya mendapat perhatian yang cukup besar karena didalamnya

terkait dengan hajat hidup orang banyak. Pembinaan Pasar Tradisional menjadi tempat belanja yang bercitra positif adalah suatu tantangan yang cukup berat dan harus diupayakan sebagai rasa tanggung jawab kepada publik.

Pembinaan pasar tradisional tentu saja bukan hanya tugas pemerintah tetapi juga masyarakat, pengelola pasar dan para pedagang tradisional untuk bersinergi menghapus kesan negative tersebut sehingga pasar tradisional masih tetap eksis di tengah persaingan yang semakin ketat.

### **2.3.2. Pengelolaan Manajemen Pasar**

Pertumbuhan pasar tradisional semakin hari tidak menunjukkan perkembangan ke arah kemajuan. Banyak hal yang menjadi kendala diantaranya (1) Perkembangan ritel pasar modern dan berdirinya supermall, dan supermarket. (2) Pengelolaan pasar tradisional yang sentralistik terdapat ancaman persaingan dengan pasar modern terutama untuk mata rantai pemasaran. (3) Miss Management dalam pengelolaan pasar tradisional dan pasar Modern terutama dalam pengelolaan pendapatan. Dalam persaingan dengan pasar modern, pasar tradisional tidak memiliki fleksibilitas dan kaku karena kebanyakan dihuni oleh pedagang skala kecil. Hal ini merupakan kelemahan dasar pasar tradisional, sehingga perlu perubahan ke arah pasar tradisional yang partisipatif dan dikelola secara otonom. Maka dalam riset ini mencari jawaban atas pertanyaan bagaimana penataan kelembagaan pasar tradisional dengan model partisipatif. Dengan jalan mengetahui sistem penataan integratif struktural pasar tradisional dengan lingkungan dan sumber produksi-distribusi-konsumsi. Mengetahui tahapan perubahan (transformasi) pasar tradisional sentralistik ke arah pasar tradisional partisipatif. Terakhir mengetahui penataan kelembagaan pasar tradisional dengan model partisipatif. Adapun keinginan mengetahui dan mencari penataan kelembagaan pasar tradisional dengan model partisipatif ini, didasari hipotesis yang menyatakan bahwa ; Pasar tradisional mengalami kemunduran atau kegagalan di era modern karena kesalahan penataan yang cenderung sentralistik tanpa melibatkan kemitraan (pedagang-pemerintah-wargapasar-stakeholder pasar). Sedangkan hasil yang diharapkan adalah terbentuknya kebijakan pemerintah yang partisipatif , sehingga dalam pengelolaannya mengutamakan kemitraan, otonom , integratif struktural, agar dapat membangun pasar tradisional yang kompetitif, mampu mensejahterakan warga pasar dan semua yang terlibat dalam jaringan pasar tradisional, mampu bersaing dengan pasar modern dan meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

### **2.3.3. Revitalisasi Pasar Tradisional di Kabupaten Bekasi**

Revitalisasi dua pasar tradisional di Kabupaten Bekasi, yakni Pasar Cikarang dan Sukatani, akan menggunakan sistem perjanjian Build Operate Transfer (BOT) antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan pihak swasta. Penjajakan kerja sama pun akan dilakukan pada tahun ini. Pengerjaan revitalisasi pasar tradisional melalui sistem BOT ini, dinilai akan lebih menguntungkan pemerintah. Sebab, pemerintah daerah tidak perlu mengeluarkan anggaran daerah dalam revitalisasi tersebut. Revitalisasi kedua pasar tradisional itu dilakukan pihak perusahaan swasta dengan sistem perjanjian BOT, melalui mekanisme sistem BOT, meski pembangunan dalam revitalisasi pasar tidak menggunakan anggaran daerah, akan tetapi pemerintah akan mendapatkan retribusi setiap tahunnya yang masuk ke kas daerah. Meskipun ada perjanjian antara pemerintah dan perusahaan swasta dalam jangka waktu minimal 25-30 tahun, kepemilikan bangunan pasar itu akan dikembalikan ke pemerintah. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh pemerintah dengan revitalisasi pasar menggunakan sistem BOT itu, di antaranya membangun pasar untuk rakyat tanpa mengeluarkan anggaran, retribusi tetap dipungut, dan kepemilikan pasar dikembalikan kepada pemerintah meskipun dalam jangka waktu tertentu.

#### **2.3.4. Kondisi Perpasaran di Indonesia**

Pendalaman Atas Perpres 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, PP RI No. 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan, UU RI No. 9 Tahun 1999 Tentang Usaha Kecil, UU RI No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, UU RI No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Banyak penelitian dan kajian dilakukan praktisi, akademisi, pemerintah terus melakukan pendalaman mengenai sistem perdagangan untuk tata pasar khususnya pasar tradisional dan modern. Kita dapat pilah dua karakteristik tata kelola pasar tradisional dan modern kini, pasar tradisional cenderung kumuh, kotor, sembrawat, lahan parkir yang tak tertata, keamanan pasar yang tidak terjamin, penempatan/penataan produk dan komoditi yang sembarangan dan tentunya pengelolaan pasar yang masih belum professional, ini berbanding terbalik dengan kondisi pasar modern yang memiliki tempat yang bersih, dijaga keamanan yang memadai, tata produk/komoditi yang terklasifikasi, manajemen yang terstruktur dalam pola perlakuan professional. Inti masalah harus ditemukan, pertama, bagaimana membuat pasar tradisional yang secara kesehatan memadai (hygienis, bersih dan rapih), penanganan sampah yang teratur, keamanan yang terjamin dan tentunya standar baku pengelolaan/manajemen yang profesional. Ini membutuhkan kerja keras dari semua pihak, Pemda Kabupaten/Kota-Provinsi dan semua elemen yang bersinggungan dengan kondisi pasar saat ini. Menurunnya konsumen ke pasar tradisional dapat dianalisis melalui beberapa segi, baik dari sisi konsumen maupun kondisi pasar tradisional yang telah digambarkan tadi. Persaingan perdagangan retail yang bermain yang menjual mata dagangan yang sama, yaitu seperti kebutuhan sehari-hari dimana komoditas tersebut sesungguhnya menjadi bagian dari kesulitan pasar tradisional untuk meraih pasar. Dengan demikian sesungguhnya yang terjadi bisa jadi kompetisi keras diantara intra-type, yakni sesama hypermarket atau supermarket, dan sesama kelompok pedagang tradisional, seperti sesama toko dipasar tradisional, sesama warung, sesama pedagang kaki lima, yang tingkat barrier to entry-nya dari segi modal minim.

Ada alur dan mata rantai yang sesungguhnya menjadi titik poin pembenahan seperti yang diharapkan oleh pengaturan tentang pasar tradisional dan pasar modern yang ditandatangani Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 112/2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pada 27 Desember 2007. Pemerintah selalu mencoba mencarikan jalan keluar dari benturan-benturan dengan langkah-langkah antisifatif. Dengan menerbitkan sejumlah Undang-undang, Perpres dan aturan lainnya. Bahasan dibawah ini, kita akan dedah ulang atas tata aturan yang dapat dilakukan baik oleh pelaku usaha, konsumen maupun pemegang regulasi untuk secepatnya bertindak melakukan penataan yang tidak hanya bersandar pada Perpres yang baru keluar ini. Pasca Perpres 112 Keluar Dalam Perpres No. 122/2007 yang terdiri dari 8 Bab dan 20 Pasal disebutkan bahwa keluarnya peraturan tersebut dilatarbelakangi oleh makin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan. Selain itu untuk membina pengembangan industri dan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, perlu memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, serta norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen.

Perpres menerbitkan regulasi tentang pengaturan pasar modern dengan substansi masalah, antara lain peraturan zonasi, hari dan jam buka, serta program kemitraan wajib antara pasar modern dan UMKM (Usaha Menengah Kecil Mikro). Untuk pemataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern diuraikan dalam pasar 2 yaitu lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu



pada Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya. Pendirian juga wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta usaha kecil, termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (duaratus meter persegi) luas lantai penjualan pasar tradisional (pengelolaan ini dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pasar tradisional dengan pihak lain) dan menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib, dan ruang publik yang aman.

## **2.4. Pencapaian Target Retribusi**

### **2.4.1. Retribusi Daerah**

Data ekonomi Makro, merupakan gambaran umum kondisi ekonomi yang terjadi di suatu daerah. Dengan demikian dari data ini dapat diketahui banyak hal berkaitan dengan ekonomi daerah dan masyarakat daerah.

1. Dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dapat diketahui berapa rata-rata pendapatan perkapita masyarakat secara umum. Disamping itu juga dapat diketahui sektor ekonomi atau lapangan usaha mana yang paling besar kontribusinya terhadap perekonomian Daerah (Produk Domestik Regional Bruto, PDRB), (*Gross Regional Domestic Product, GRDP*). Lapangan usaha/ sektor ekonomi apa yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi sebagai penggerak ekonomi daerah dan lapangan usaha mana yang belum saatnya diharapkan untuk menanggung beban tersebut.
2. Dari data distribusi penduduk menurut lapangan pekerjaan utama, dapat diketahui sektor ekonomi atau lapangan usaha mana yang paling besar kontribusinya dalam menciptakan lapangan pekerjaan, Sektor ekonomi atau lapangan usaha mana yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi sebagai penampung pencari kerja dan penggerak ekonomi daerah. Disamping itu dapat diketahui sektor ekonomi atau lapangan usaha mana yang paling mungkin dijadikan penggerak ekonomi daerah, dan diketahui juga mana lapangan usaha yang belum saatnya dibebani tugas sebagai ekonomi, bahkan harus dibantu untuk jangka waktu tertentu, sehingga dapat tumbuh dengan sehat.

Berkaitan dengan pembebanan tarif retribusi pelayanan pasar. Pada pasal 14 paragraf 6 bab III tentang Obyek Retribusi pada ayat (1) obyek retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f, adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus untuk pedagang. Pada ayat (2) Dikecualikan dari obyek retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

### **2.4.2. Objek Retribusi daerah**

Objek Retribusi daerah dapat dibagi menjadi : a). Jasa umum, b). Jasa usaha dan c) Perizinan tertentu. Jasa yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Daerah bukan merupakan objek Retribusi.

#### **2.4.2.1. Kriteria Retribusi Jasa Umum**

1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar Retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;

4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan Retribusi;
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial;
7. Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/ atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

#### **2.4.2.2. Kriteria Retribusi Jasa Umum**

1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu;
2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogianya disediakan oleh sector swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/ dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

#### **2.4.2.3. Kriteria Retribusi Perizinan Terpadu**

1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;
2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum;
3. Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi perizinan.

Selain tiga jenis Retribusi di atas, dapat pula ditetapkan jenis Retribusi yang lainnya yang sesuai dengan kewenangan ekonomi dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, dan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hasil penerimaan jenis Retribusi tertentu dari Daerah Kabupaten sebagian diperuntukkan kepada Desa. Dan bagian yang diterima Desa ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan memperhatikan aspek keterlibatan Desa dalam penyediaan layanan tersebut. Untuk memperoleh gambaran jenis-jenis Retribusi apa saja yang diatur di dalamnya, dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang menjelaskan adanya jenis-jenis Retribusi sebagaimana dimaksud di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
3. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
4. Retribusi Izin Gangguan;
5. Retribusi Izin Trayek;
6. Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.

#### **2.4.3. Cara Penghitungan Retribusi**

Penghitungan Retribusi dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

**Rumus = Tingkat penggunaan jasa x Tarif Retribusi**

Tingkat penggunaan jasa diukur dengan:

1. Nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan
2. Dapat ditentukan seragam atau diadakan pembedaan sesuai prinsip dan sasaran tarif

#### **2.4.4. Peraturan Daerah Tentang Retribusi**

Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan Peraturan Daerah tentang Retribusi tersebut tidak berlaku surut. Peraturan Daerah tentang Retribusi sekurang-kurangnya mengatur ketentuan

mengenai :

1. Nama, objek, dan subjek Retribusi
2. Golongan Retribusi
3. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan
4. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi
5. Wilayah pemungutan
6. Tata cara pemungutan
7. Sanksi administrasi
8. Tata cara penagihan
9. Tanggal mulai berlakunya.

Peraturan Daerah tentang Retribusi dapat mengatur ketentuan mengenai:

1. Masa Retribusi
2. Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/ atau sanksinya
3. Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.

Peraturan daerah untuk jenis-jenis Retribusi yang tergolong dalam Retribusi Perizinan Tertentu harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan. Ketentuan untuk mengatur tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah. Untuk melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah harus disampaikan kepada Pemerintah paling lama 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan. Jika Peraturan daerah yang dibuat bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dimaksud. Pembatalan dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### **2.4.5. Prinsip Dan Sasaran Penentuan Tarif**

##### **Retribusi Jasa Umum**

Ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

##### **Retribusi Jasa Usaha**

Ditentukan berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

##### **Retribusi Perizinan Tertentu**

Ditentukan berdasarkan tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

#### **2.4.6. Sistem Pemungutan Retribusi**

Sistem pemungutan Retribusi daerah adalah sistem *official assessment*, yaitu pemungutan Retribusi daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib Retribusi setelah menerima SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) pada Kantor Pos atau bank persepsi. Jika Wajib Retribusi tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif, sedangkan pegujiannya dilakukan meliputi uji validitas dan uji reabilitas, pengujian validitas bertujuan untuk mengetahui apakah semua pertanyaan yang meliputi hal-hal yang diajukan untuk mengukur variabel penelitian apakah sudah valid atau belum. Pengujian realibilitas digunakan untuk mengukur konsistensi jawaban responden.

### 3.2. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan bersifat diskriptif analisis yaitu dengan menganalisis pengaruh pengawasan dan revitalisasi pasar tradisional di lingkungan wilayah kerja Dinas Perindagkop Dan UMKM Kabupaten Bekasi, dalam analisis yang digunakan data yang bersifat kualitatif Diskriptif data di kelompokkan menjadi data primer dan data sekunder.

### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan ini dilakukan penelitian dengan cara studi pustaka yaitu dengan cara melakukan pengumpulan informasi, teori, dan data yang ada kaitannya dengan penelitian ini meliputi Wawancara (*interview*) dan Kuisisioner.

### 3.4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa semua data yang diperoleh, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisa sebagai berikut :

#### 1. Uji Normalitas (uji validitas dan uji realibilitas kuesioner)

Validitas dilakukan berkenaan dengan ketepatan alat ukur terhadap konsep yang diukur sehingga benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Menurut

$$R_{xy} = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{n \sum X^2 - (\sum X)^2} \sqrt{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

Dimana :

$R_{xy}$  = koefisien korelasi

$n$  = Jumlah Subjek

$X$  = Skor tiap pertanyaan

$Y$  = Skor total

$\sum X$  = Jumlah kuadrat skor pertanyaan

$\sum Y$  = Jumlah kuadrat skor pertanyaan

$(\sum X)^2$  = Kuadrat jumlah skor pertanyaan

$(\sum Y)^2$  = Kuadrat jumlah skor total

Sedangkan pengujian reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi jawaban responden. Kriteria pengujian dilakukan dengan menggunakan pengujian *Cronbach Alpha*. Kriteria penggunaan *Cronbach alpha* dalam pengambilan keputusan pengujian reliabilitas tidak bersifat *absolute* harus menggunakan cut off 0,6.

Pengambilan keputusan :

Jika  $CA < 0,6$  maka tidak reliable

Jika  $CA > 0,6$  maka reliable

#### 2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terdiri dari Uji Multikolinieritas, Uji Autokorelasi dan Uji Heteroskedastisitas. Pengujian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa model yang diperoleh benar-benar memenuhi asumsi dasar dalam analisis regresi yang meliputi asumsi-asumsi : terjadi normalitas, tidak terjadi multikolinearitas, tidak terjadi autokorelasi, dan tidak terjadi heteroskedastisitas, serta untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan tingkat yang signifikan dan representative atau disebut BLUE (*Best Linier Unbiased Etimator*)

### 3. Uji Regresi Linier Berganda.

#### a. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) atau pengujian *Goodness of Fit Model*.

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel terikat. Besarnya nilai  $R^2$  adalah antara 0 sampai 1. Nilai  $R^2$  menjauhi angka 1 atau mendekati 0 berarti variabel-variabel bebas tidak mampu menjelaskan variasi variabel terikat,  $R^2$  mendekati 1 berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.

#### b. Uji F (Pengujian Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji apakah secara bersama-sama seluruh variabel *independent* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel *dependent*. Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian secara simultan ini adalah dengan membandingkan  $p\text{-Value} < \alpha 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan sebaliknya jika  $p\text{-value} > \alpha 0,05$  maka  $H_0$  diterima.

$H_0 : b_1 = b_2 = 0$

Diduga pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung secara bersama-sama tidak dapat mempengaruhi revitalisasi pasar tradisional.

$H_a : b_1 \neq b_2 \neq 0$

Diduga pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung secara bersama-sama dapat mempengaruhi revitalisasi pasar tradisional.

#### c. Uji t (Pengujian Parsial).

Untuk menguji koefisien regresi dilakukan pengujian secara parsial untuk melihat signifikan dari pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan variabel lain adalah konstan. Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian secara parsial ini adalah dengan membandingkan  $p\text{-value}$  dengan  $\alpha$  sebesar 0,05. Jika  $p\text{-value} < \alpha 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan sebaliknya jika  $p\text{-value} > \alpha 0,05$  maka  $H_0$  diterima.

## 4. HASIL ANALISADAN PEMBAHASAN

### 4.1. Hasil Analisis

#### 4.1.1. Uji Reliabilitas dan validitas

##### 1. Variabel Pengawasan Langsung

Tabel 4.1

**Pengujian reliabilitas Validitas Pengawasan Langsung (XI) Awal**

Variabel	Cronbach's Alpha	Item Merek	Keputusan
Pengawasan Langsung	0,881	10	<i>Reliabel</i>

Sumber : Data diolah, SPSS 17.0

Interprestasi Hasil:

Pengambilan Keputusan:

Jika  $CA < 0,6$  maka data tidak *reliable*

Jika  $CA > 0,6$  maka data *reliable*

Dari hasil uji reliabilitas di atas di ketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* pada pengujian awal  $< 0,6$  yaitu sebesar 0,881 dangan demikian menunjukkan bahwa item-item pertanyaan dari variabel Pengawasan Langsung (XI) adalah *reliable*



**Tabel 4.2**  
**Pengujian Validitas Variabel Pengawasan Langsung (X1)**

Item Pertanyaan	<i>Pearson Correlatin</i>	Sig. (2-tailed)	Keputusan
X1. 1	0,683**	0,000	Valid
X1. 2	0,745**	0,000	Valid
X1. 3	0,764**	0,000	Valid
X1. 4	0,455**	0,002	Valid
X1. 5	0,736**	0,000	Valid
X1. 6	0,658**	0,000	Valid
X1. 7	0,673**	0,000	Valid
X1. 8	0,807**	0,000	Valid
X1. 9	0,735**	0,000	Valid
X1. 10	0,709**	0,000	Valid

*Sumber: Data diolah SPSS 17.0*

Interprestasi Hasil

Pengambilan Keputusan:

Jika Sig. (2-tailed) < 0,05 maka data valid

Jika Sig (2-taillet) > 0,05 maka data tidak valid

Berdasarkan hasil pengujian validitas didapat hasil Sig. (2-tailed) < 0,05 pada item-item pertanyaan no.1,2,3, dan 10 Pengawasan Langsung (X1) tersebut sehingga dikatakan valid.

## 2. Variabel Pengawasan Tidak Langsung

**Tabel 4.3**  
**Pengujian reliabilitas Variabel Pengawasan Tidak Langsung (X2)**

Variabel	Cronbach's Alpha	Item pertanyaan	Keputusan
Pengawasan Tidak Langsung	0.882	10	<i>Reliable</i>

*Sumber: Data Diolah, SPSS 17.0*

Interprestasi Hasil:

Pengambilan Keputusan:

Jika CA < 0,6 maka data tidak *reliable*

Jika CA > 0,6 maka data *reliable*

Dari hasil uji relibilitas dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* pada pengujian awal > 0,6 yaitu sebesar 0,881. dengan demikian menunjukkan bahwa item-item dari pertanyaan dari variabel Pengawasan Tidak Langsung (X2) adalah *reliable*

**Tabel 4.4**  
**Pengujian Validitas Pengawasan Tidak Langsung (X2)**

Item Pertanyaan	Pearson Corelation	Sig. (2-tailed)	Keputusan
X2.1	0,721	0,000	Valid
X2.2	0,787	0,000	Valid
X2.3	0,766	0,000	Valid
X2.4	0,719	0,000	Valid
X2.5	0,632	0,000	Valid
X2.6	0,704	0,000	Valid
X2.7	0,661	0,000	Valid
X2.8	0,631	0,000	Valid
X2.9	0,710	0,000	Valid
X2.10	0,630	0,000	Valid

Sumber: Data Diolah, SPSS 17.0

Interprestasi Hasil:

Pengambilan Keputusan:

Jika Sig.(2-tailed) < 0,05 maka data valid

Jika Sig.(2-tailed) > 0,05 maka data tidak valid

Didapat hasil Sig. (2-tailed) < 0,05 pada item-item pertanyaan tersebut valid.

### 1. Variabel Revitalisasi Pasar Tradisional (Y)

**Tabel 4.5**  
**Pengujian reliabilitas Variabel Revitalisasi Pasar Tradisional (Y) Awal**

Variabel	Cronbach's alpha	Item pertanyaan	Keputusan
<b>Revitalisasi Pasar Tradisional</b>	<b>0,868</b>	<b>10</b>	<b>Valid</b>

Sumber: data diolah, SPSS 17.0

Interprestasi hasil:

Pengambilan keputusan:

Jika CA < 0,06 maka data tidak *reliabel*

Jika CA > 0,06 maka data *reliabel*.

Dari hasil uji reabilitas dapat diketahui nilai *Cronbach Alpha* pada pengujian awal > 0,6 yaitu sebesar 0,868. dengan demikian menunjukkan bahwa item-item pertanyaan dari variabel Revitalisasi Pasar Tradisional (Y) adalah *reliabel*

**Tabel 4.6**  
**Pengujian Vlidilitas Revitalisasi Pasar Tradisional (Y) Awal**

Item pertanyaan	Pearson Corelation	Sig. (2-taillet)	Keputusan
Y1	0,675	0,000	Valid
Y2	0,743	0,000	Valid
Y3	0,750	0,000	Valid
Y4	0,725	0,000	Valid
Y5	0,651	0,000	Valid
Y6	0,684	0,000	Valid
Y7	0,667	0,000	Valid
Y8	0,431	0,003	Valid
Y9	0,711	0,000	Valid
Y10	0,727	0,000	Valid

Sumber :data diolah, SPSS 17.0

#### 4.1.2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisa data, dilakukan terlebih dulu pengujian terhadap data-data yang dilakukan dalam penelitian dengan bantuan *software* SPSS, dihasil dari analisa akan dibahas pada bagian berikut:

##### 1. Uji Multikolinieritas

berdasarkan hasil pengolahan data uji Multikolinieritas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Multikolinieritas Dengan VIP( *Variance inflation Factor*)**

Variabel	Tolerance	VIP	Keputusan
Pengawasan Langsung	0,996	1,004	tidak terjadi multikolinieritas
Pengawasan Tidak Langsung	0,996	1,004	tidak terjadi multikolinieritas

Sumber : Data diolah SPSS 17.0

Dari tabel 4.7 dapat dilihat nilai VIP dari variabel Pengawasan langsung (X1) dan variabel Pengawasan Tidak Langsung (X2) tidak ada nilai lebih dari 10, maka dapat dikatakan bahwa model regresi dari variabel tersebut tidak ada multikolinieritas atau  $H_0$  diterima.

##### 1. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil pengolahan data uji Heteroskedastisitas dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Heterokedastitas**

Variabel	Sig	Keputusan
Pengawasan Langsung	0,112	Tidak ada heteroskedastisitas
Pengawasan Tidak Langsung	0,659	Tidak ada heteroskedastisitas

Sumber : Data diolah SPSS 17.0

Dari hasil uji Heteroskedastisitas tersebut diatas dengan melihat *unstandardized residual correlation coffetient* menunjukkan bahwa nilai Sig variabel Pengawasan Langsung (X1) adalah  $> 0,05$  yaitu sebesar 0,112 dan nilai Sig variabel Pengawasan Tidak Langsung (X2) adalah  $. 0,05$  yaitu sebesar 0,659. hal ini berarti  $H_0$  maka kedua variabel independent tidak terjadi heteroskedastitas.

#### 4.2. Pembahasan

##### 4.2.1. Uji Hipotesa

Pengujian hipotesa dilakukan dengan melihat nilai signifikasi dari setiap hubungan . *level of significance* ( $\alpha$ ) yang ditetapkan sebesar 5% yang berarti bahwa batas toleransi kesalahan yang dapat ditoleransi adalah sebesar 5%. Dengan kata lain, *level of significane* dari pengujian hipotesis ini adalah sebesar 95%, apabila  $p\text{-value} < 0,05$ , maka dapat dikatakan bahwa variabel independent terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent.

##### 1. Uji t

**Tabel 4.9**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	45.605	7.011		6.505	.000		
	Pengawasan Langsung	-.222	.137	-.243	-1.625	.112	.996	1.004
	Pengawasan Tidak Langsung	-.067	.150	-.066	-.444	.659	.996	1.004

a. Dependent Variable: Revitalisasi pasar tradisional

Berdasarkan hasil uji t diatas dengan tingkat keyakinan sebesar 95%, terdapat bahwa:

1) **Koefisien untuk Pengawasan Langsung**

- Statistik t hitung didapat angka -1,625
- Oleh karena t hitung < t tabel (-1,625 < -2,021) maka Ho diterima berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Pengawasan langsung (X1) terhadap Revitalisasi pasar tradisional (Y)

2) **Koefisien untuk Pengawasan Tidak Langsung**

- Statistik t hitung didapat angka 0.44
- Oleh karena t hitung > t tabel (-0,444 < 2,021) Ho ditolak berarti ada Pengaruh yang signifikan dari variabel Pengawasan Tidak Langsung (X2) dengan Revitalisasi Pasar Tradisional (Y)

**2. Uji F**

Uji F digunakan untuk menguji apakah secara bersama-sama seluruh variabel independent mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Uji F akan diputuskan menerima atau menolak hipotesa yang akan diajukan, bila F hitung < F, maka Ho diterima dan Ho ditolak berarti semua variabel independent secara simultan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel independent. Bila F hitung > F tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, berarti semua variabel independent secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji F**  
**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	61.018	2	30.509	1.469	.242 <sup>a</sup>
	Residual	872.093	42	20.764		
	Total	933.111	44			

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Tidak Langsung, Pengawasan Langsung

b. Dependent Variable: Revitalisasi Pasar Tradisional

Sumber : Data diolah, SPSS 17.0

Uji Anova atau uji F digunakan untuk menguji model regresi. F tabel menggunakan probabilitas 5%, derajat kebebasan (*degree of freedom* (df1) = 2 dan *degree of freedom* (df2) = 27) dan tingkat keyakinan sebesar 95%, terdapat bahwa:

- F hitung yang didapat 14,278
- Oleh karena F hitung > F tabel (14,278 > 3,23), maka  $H_a$  diterima atau  $H_o$  ditolak yaitu bahwa variabel pengawasan Langsung (X1) dan Pengawasan Tidak langsung (X2) tersebut secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Revitalisasi Pasar tradisional (Y).

## 1. Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 4.11**  
**Hasil uji koefisien Determinasi**  
**Model Summary <sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.256 <sup>a</sup>	.065	.021	4.55677	1.789

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Tidak Langsung, Pengawasan Langsung

b. Dependent Variable: Revitalisasi Pasar Tradisional

Pada tabel diatas besarnya korelasi (R) sebesar 0,256 yang berarti menunjukkan bahwa adanya korelasi atau hubungan yang lemah antara Pengawasan Langsung (X1) dan Pengawasan Tidak Langsung (X2) secara bersama-sama terhadap Revitalisasi Pasar Tradisional (Y). Besarnya *coefficient of determination* ( $R^2$ ) adalah 0,65 atau 6,5% yang berarti variabel independent yang terdiri dari Pengawasan Langsung (X1) dan Pengawasan Tidak Langsung (X2) dapat memberikan kontribusi pengaruh sebesar 6,5% sedangkan sisanya diterangkan oleh variabel lain.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian dan analisis data yang diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan beberapa uraian dan analisis data yang diperoleh dapat diambil kesimpulan bahwa: Besarnya korelasi (R) sebesar 0,256 yang berarti menunjukkan bahwa adanya korelasi atau hubungan yang lemah antara Pengawasan Langsung (X1) dan Pengawasan Tidak Langsung (X2) secara bersama-sama terhadap Revitalisasi Pasar Tradisional (Y).
2. Besarnya *coefficient of determination* ( $R^2$ ) adalah 0,65 atau 6,5% yang berarti variabel independent yang terdiri dari Pengawasan Langsung (X1) dan Pengawasan Tidak Langsung (X2) dapat memberikan kontribusi pengaruh sebesar 6,5% sedangkan sisanya diterangkan oleh variabel lain.
3. Berdasarkan Uji t, Koefisien untuk Pengawasan Langsung
  - t hitung < t tabel (-1,625 < 2,021) maka  $H_o$  diterima berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Pengawasan langsung (X1) terhadap Revitalisasi pasar tradisional (Y)
 Berdasarkan Uji t, Koefisien untuk Pengawasan Tidak Langsung
  - t hitung < t tabel (-0,444 < 2,021)  $H_o$  ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel Pengawasan Tidak Langsung (X2) dengan Revitalisasi Pasar Tradisional (Y).
4. Berdasarkan F tabel ( 14,278 > 3,23) =  $H_a$  diterima atau  $H_o$  ditolak yaitu variabel Pengawasan langsung (X1) dan variabel pengawasan tidak langsung (X2) secara bersama-sama ( simultan ) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Revitalisasi pasar tradisional (Y).



## 5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh maka penulis dapat memberikan saran atau pun masukan kepada Dinas Perindagkop Dan UMKM Kabupaten Bekasi yang berhubungan dengan Revitalisasi Pasar Tradisional :

1. Pengawasan langsung secara parsial berdasarkan Uji t memberikan hasil tidak berpengaruh terhadap proses revitalisasi pasar tradisional di kabupaten Bekasi, hal ini dikarenakan proses revitalisasi masih menjadi perdebatan diantara pengambil keputusan, Stakeholder dan pelaku dan belum dikeluarkan regulasi yang memiliki kekuatan hukum tetap maka belum diperlukan sekali adanya pengawasan langsung di dalam proses revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Bekasi, yang rencananya ada 2 pasar yang akan di revitalisasi dengan sistem BOT yaitu pasar Cikarang dan Pasar Sukatani .
2. Sedangkan untuk pengawasan tidak langsung memberikan hasil yang signifikan terhadap proses Revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Bekasi, dengan harapan kebijakan dalam bentuk regulasi ini harus terus di dorong supaya proses revitalisasi pasar tradisional dapat berjalan secara optimal.
3. Karena kedua variabel dalam penelitian ini yaitu pengawasan langsung (X1) dan pengawasan tidak langsung (X2) memberikan hubungan atau pengaruh yang lemah terhadap proses Revitalisasi pasar tradisional dan berdasarkan Uji Determinasi di dapatkan hasil hanya memberikan pengaruh sebesar 6,5 %, maka saat ini yang lebih diperlukan dalam proses revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Bekasi ini adalah koordinasi, baik antar pejabat atau pemangku kebijakan, antara pejabat dengan stakeholder dan pelaku revitalisasi pasar tradisional, disamping memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusianya dan manajemen pengelolaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gie, The Liang. 1981. Efisiensi Kerja Bagi Pembangunan Negara. Jakarta. PT.Gunung Agung.
- Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 2007. Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern.
- Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008. Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern.
- Malayu S.P. Hasibuan. 1994. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta. PT. Haji Masagung.
- Malayu S.P. Hasibuan. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia.(Edisi Revisi). Jakarta. Penerbit PT. Bumi Aksara.
- Mc. Farland dalam Handyaningrat. 2004. Management Foundations and Practices. New York. Mc. Millan.
- Sondang.P.Siagian. 1998. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta. Penerbit PT. Bumi Aksara.
- Sondang.P.Siagian. 2006. Organisasi. Jakarta. Penerbit PT. Haji Masagung.
- Sugiono. 1992. Metode Penelitian Administrasi. Bandung . PT. Alfabeta.
- Wahyudi. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta. PT. Suhita Indonesia.
- Warsanto, I.G. 1995. Dasar-dasar Manajemen. Jakarta. Dian Pustaka.
- Winardi. 1998. Kepemimpinan Dalam Manajemen. Jakarta. Penerbit. Rineka Cipta.